

ABSTRAK

Penelitian ini difokuskan pada upaya peningkatan Indeks Pendidikan ditinjau dari pembangunan pendidikan dasar, dengan judul "Implementasi Kebijakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Di Kabupaten Karawang". Penelitian ini berangkat dari kenyataan bahwa proses implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar dapat efektif jika didukung oleh kapasitas agen-agen pelaksana pendidikan, hubungan antar organisasi pendidikan, sumber daya pendidikan dan faktor-faktor lingkungan pendidikan. Lokasi penelitian ini dilakukan di kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat.

Dalam penelitian ini, desain yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini berkaitan dengan pandangan aparatur dinas pendidikan Kabupaten dan aparatur pendidikan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di kecamatan dalam mengimplementasikan kebijakan wajib belajar pendidikan dasar di Kabupaten Karawang.

Implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar di kabupaten Karawang hasilnya belum sesuai dengan harapan masyarakat karena agen-agen pelaksana pendidikan sebagai *implementator* belum memiliki kapasitas yang cukup memadai. Hubungan koordinasi yang sinergis dan integratif belum terjadi secara optimal dalam melakukan kerja sama secara fungsional dengan Sekertaris Daerah, Bappeda kabupaten, SKPD bagian asset dan keuangan serta DPRD agar seluruh organ pemerintah daerah dapat mendukung kesuksesan penyelenggaraan wajib belajar pendidikan dasar di kabupaten Karawang.

Sumber daya implementasi pendidikanpun masih perlu ditingkatkan dengan cara meningkatkan anggaran pendidikan sesuai dengan kemampuan daerah, meningkatkan kualifikasi dan kompetensi aparatur pelaksana pendidikan serta meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, faktor lingkungan yang belum dapat mendukung implementasi kebijakan wajib belajar pendidikan dasar dengan merespon secara positif dan akomodatif tuntutan perubahan dan perkembangan masyarakat sesuai dengan perkembangan IPTEK di lingkungan masyarakat.

Kata kunci : *Implementasi Kebijakan, Wajib Belajar, Pendidikan Dasar.*